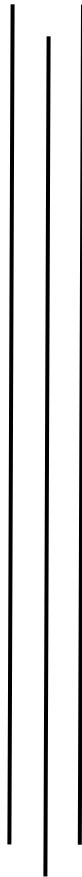
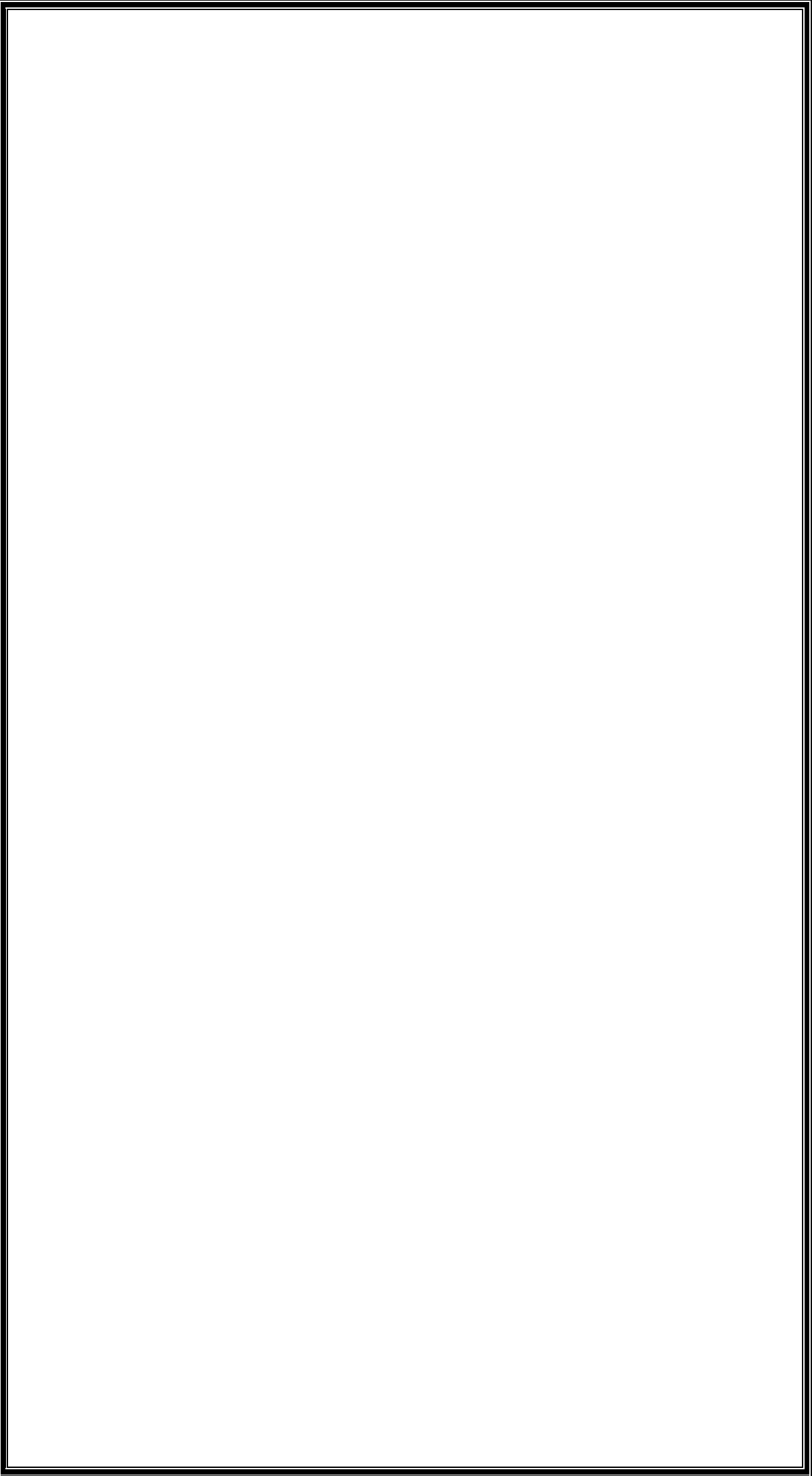




REVISI
RENSTRA 2021 - 2026



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SIJUNJUNG**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis Organisasi Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Periode 2021-2026 dapat tersusun, sesuai dengan waktunya.

Rencana Strategis Organisasi Kerja Perangkat Daerah ini disusun untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung yang memfokuskan pada optimalisasi kinerja dinas dalam melaksanakan program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam menuju *good governance*. Secara konsisten diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi terhadap pelayanan publik.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah ini bertujuan untuk menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama Tahun 2021-2026, yang disertai dengan program prioritas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung. Adapun pedoman yang dipakai adalah RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah ini berisi perumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama Tahun 2021- 2026.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah ini terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Pelayanan, Isu - Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Dengan

disusunnya Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peningkatan kualitas kinerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik guna menjawab dinamika dan perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Akhirnya semoga Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah ini dapat bermanfaat sebagai pijakan dalam pelaksanaan tugas membangun daerah yang lebih maju.

Muaro Sijunjung, Maret 2023
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA



RONI SATRIA, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19771024 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum 1

 1.3. Maksud dan Tujuan 3

 1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD 6

 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD 6

 2.2. Sumber Daya PD 9

 2.2.1 Sumber Daya Manusia 9

 2.2.2 Fasilitas Sarana dan Prasarana PD 10

 2.3. Kinerja Pelayanan PD 10

 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD 17

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 19

 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD 19

 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 21

 3.2.1 Visi 21

 3.2.2 Misi 22

 3.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah 23

 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/kota 23

 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 24

 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 24

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 31

 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD 31

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN OPD 33

 5.1 Strategi 33

 5.2 Kebijakan 33

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF 38

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 47

BAB VIII PENUTUP 48

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung 12

TABEL 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021 13

TABEL 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 33

TABEL 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 36

TABEL 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siunjung 40

TABEL 7.1 Indikator Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021—2026 56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Upaya mewujudkan *Good Governance* merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara pemerintahan, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Yang Mengamanatkan Adanya Penyempurnaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Satu Kesatuan Perencanaan Pembangunan Nasional”.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan diperlukan adanya data dan informasi yang lengkap serta memerlukan perlindungan berbagai aspek yang sifatnya makro. Isi data dan informasi yang lengkap dan mutakhir perlu dikaitkan dengan adanya pendekatan perencanaan. Pembangunan sesuai dengan program visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dengan melibatkan semua pihak yang berpengaruh (Stakeholders). Sejalan dengan hal tersebut diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan upaya mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah. Undang-Undang dimaksud juga menuntut adanya kewajiban konstitusi bagi penyelenggara pemerintah daerah termasuk didalamnya Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun suatu dokumen perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Renstra PD untuk periode 5 (Lima) tahun. Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 bertujuan untuk memberikan arah, masukan, dan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam mengemban tugas tersebut perlu dipersiapkan secara sistematis agar pembangunan di Perangkat Daerah (PD) khususnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung mempunyai arah, tujuan, dan hasil yang jelas, dengan berprinsip pada penyusunan suatu dokumen perencanaan pembangunan yang akuntabel.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam melakukan penyusunan Renstra Kabupaten Sijunjung ini, maka beberapa peraturan baik pusat maupun daerah akan dijadikan sebagai landasan hukum, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatra Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6 tahun 2006 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021; dan
21. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode lima tahun kedepan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan sasaran bagi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2021-2026, yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

1.3.2 TUJUAN

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2021-2026, yang disertai dengan program prioritas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung dengan berpedoman pada RPJMD 2021-2026;

- b. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk progra, kegiatan, dan sub kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2021-2026.
- c. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode Renstra yang lalu.

1.4 SITEMATIKA PENULISAN.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, telaahan renstra K/L, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah PD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan arah kebijakan jangka menengah PD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PD

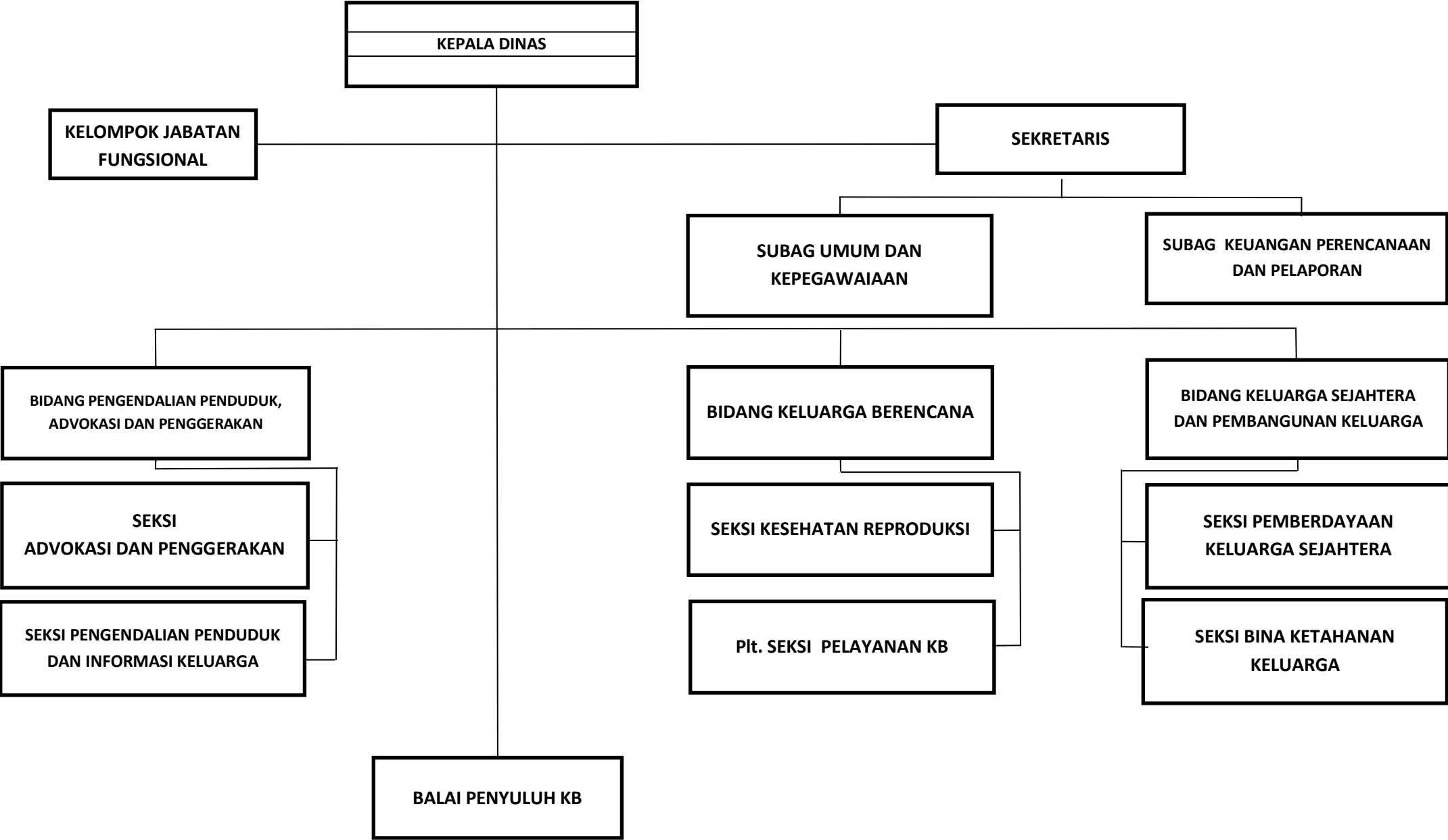
Berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Sijunjung.

Untuk menjalankan tugas diatas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung memiliki fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kauntitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
6. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB dan Kader KB;
7. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
8. Pelaksanaan pelayanan KB;
9. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan (administrasi dinas termasuk evaluasi dan pelaporan);
11. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

Adapun susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung terdiri dari:

STRUKTUR ORGANISASI



Uraian tugas dari masing – masing struktur adalah sebagai berikut:

A. SEKRETARIAT :

Mempunyai tugas melaksanakan merencanakan kegiatan operasional, memberikan layanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai 2 Subbag terdiri dari :

1. Subbag Umum dan Kepegawaian :

Mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan organisasi, humas, protocol serta urusan rumah tangga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2. Subbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan :

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengadministrasian keuangan, penyusunan perencanaan dan laporan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

B. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, ADVOKASI DAN PENGGERAKAN :

Mempunyai tugas melaksanakan merumuskan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Kuantitas Penduduk Advokasi dan Penggerakan. Bidang ini mempunyai dua seksi yaitu :

1. Seksi Advokasi dan Penggerakan :

Mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan dan menyusun pelaksanaan program dan kegiatan advokasi dan penggerakan.

2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga :

Mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan dan menghimpun pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

C. BIDANG KELUARGA BERENCANA :

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan program dan kegiatan Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan tugas bidang ini mempunyai 2 seksi yaitu :

1. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana :

Mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan dan menyusun pelaksanaan program dan kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana.

2. Seksi Kesehatan Reproduksi :

Mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan dan menyusun pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan reproduksi.

D. BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA :

Mempunyai tugas melaksanakan, merumuskan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan program dan kegiatan keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga. Bidang ini mempunyai 2 seksi yaitu :

1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera :

Mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan dan menyusun pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

2. Seksi Bina Kehatanan Keluarga :

Mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan dan menyusun pelaksanaan program Bina Ketahanan Keluarga.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk meningkatkan pelayanan pada organisasi terutama pelayanan pada masyarakat sangat dibutuhkan sumberdaya manusia yang berdayaguna dan berhasil guna baik untuk kepentingan organisasi ataupun kepentingan masyarakat sedangkan sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana saat ini berjumlah 29 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Gol : 29 Orang
 - Golongan IV : 5 orang
 - Golongan III : 12 orang
 - Golongan II : 3 orang
 - Golongan I : - orang
 - Kontrak : 9 orang
2. Berdasarkan Pendidikan :
 - Sarjana (S 2) : 5 Orang
 - Sarjana (S I) : 13 Orang
 - Sarjana Muda (D 3) : 3 Orang
 - Diploma Dua (D II) : 1 Orang
 - Diploma Satu (D I) : - Orang
 - SLTA : 7 Orang
 - SLTP : - Orang

SD : - Orang

3. Berdasarkan Jenis Kelamin :

Laki – Laki : 11 Orang

Perempuan : 18 Orang

2.2.2 FASILITAS SARANA DAN PRASARANA PD.

Untuk menunjang kegiatan operasional Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana saat ini tersedia Sarana dan Prasarana sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Gudang Obat;
2. 8 (Delapan) Unit Balai Penyuluh Keluarga Berencana di 8 Kecamatan;
3. Kendaraan dinas roda empat sebanyak 6 Unit;
4. Kendaraan dinas roda dua 32 Unit (19 di kecamatan dan 13 di kabupaten);
5. Komputer PC 26 Unit (16 di kecamatan dan 10 di kabupaten);
6. Laptop 17 Unit;
7. Alat Studio dan Komunikasi :
 - a. Infokus 10 buah (8 di kecamatan dan 2 di kabupaten);
 - b. Radio 1 buah;
 - c. Wireless 9 buah (8 di kecamatan dan 1 di kabupaten);
8. 1 unit (Genset);
9. Kamera 1 Unit;
10. Perlengkapan Multimedia Mupen 18 Item.

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

Pelayanan pemerintah dibidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana saat ini belum berjalan secara optimal, dan masih banyak terdapat hambatan-hambatan pelayanan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di lapangan.

Untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan program KKBPK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung berusaha memberikan pengayoman kepada masyarakat dalam rangka pengendalian jumlah penduduk melalui peningkatan pelayanan KB, penguatan Advokasi dan KIE KB, pembinaan remaja, penguatan regulasi kelembagaan serta data dan informasi dan pembangunan keluarga yang nantinya akan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Kegiatan dilapangan masih banyak program dan kegiatan secara kualitas belum tercapai sesuai dengan yang diharapkan, hal ini disebabkan antara lain adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan alat kontrasepsi terutama MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dan fasilitas pendukung serta sarana untuk kegiatan edukasi dan KIE, disamping itu juga disebabkan rendahnya SDM dan tingkat ekonomi keluarga.

Selain dari itu juga disebabkan karena keterbatasan Aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung terutama Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dilapangan.

Capaian Kinerja Pelayanan, anggaran dan realisasi pendanaan OPD berdasarkan Pelaksanaan Renstra Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2016-2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SIJUNJUNG

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Total Fertility Rate (TFR)	n/a	n/a	n/a	n/a	2,80	2,77	2,74	2,71	n/a	2,90	2,50	2,68	2,95	n/a	96,43	109,75	102,19	91,14
2	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif	n/a	n/a	n/a	n/a	72,12	72,15	72,18	72,21	n/a	70,56	72,56	69,09	72,46	n/a	97,84	100,6	95,72	100,35
3	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan KSI	n/a	n/a	n/a	n/a	27,22	26,32	25,42	24,52	23,62	27,76	27,76	20,90	20,90	n/a	98,02	94,53	117,78	114,76
4	Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	B	B	BB	BB	n/a	B	B	BB	BB	n/a	100	100	100	100

TABEL 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI
PENDANAAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2016-2020

NO	URAIAN	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	633.119.994	631.362.641	629.518.873	587.126.300	416.601.791	553.999.255	619.309.387	585.158.580	580.461.053	397.298.340	87,50	98,09	92,95	98,86	95,37	-27,27	-25,22
	1 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	460.585.794	466.627.441	464.783.673	418.834.300	250.259.791	399.055.636	455.674.418	423.927.746	412.699.470	233.724.440	86,64	97,65	91,21	98,54	93,39	-29,84	-27,76
	2 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	172.534.200	164.735.200	164.735.200	168.292.000	166.342.000	154.943.619	163.634.969	161.230.834	167.761.583	163.573.900	89,80	99,33	97,87	99,68	98,34	-20,70	-18,86
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	174.439.000	196.155.000	184.850.000	170.350.000	112.312.186	169.927.441	194.790.328	178.395.549	167.647.621	102.296.867	97,41	99,30	96,51	98,41	91,08	-27,05	-27,76
	1 Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kantor	174.439.000	196.155.000	184.850.000	170.350.000	112.312.186	169.927.441	194.790.328	178.395.549	167.647.621	102.296.867	97,41	99,30	96,51	98,41	91,08	-27,05	-27,76
3	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	7.500.000	15.000.000	14.034.761	47.000.000	70.513.000	2.820.750	14.919.000	14.010.400	42.963.771	70.481.000	37,61	99,46	99,83	91,41	99,95	55,70	132,37
	1 Peningkatan Sumberdaya Aparatur	7.500.000	15.000.000	14.034.761	47.000.000	70.513.000	2.820.750	14.919.000	14.010.400	42.963.771	70.481.000	37,61	99,46	99,83	91,41	99,95	55,70	132,37
5	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	3.000.000	-	-	-	-	2.815.100	-	-	-	-	93,84	-	-	-	-	-100,00	-100,00
	1 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Tahun 2016-2021	3.000.000					2.815.100	-	-	-	-	93,84	-	-	-	-	-100,00	-100,00
6	Program Keluarga Berencana	1.956.919.150	1.627.705.000	2.633.470.425	2.693.419.800	2.671.579.279	1.782.584.902	972.054.022	1.797.536.602	2.374.722.253	2.370.085.321	91,09	59,72	68,26	88,17	88,71	-10,71	-5,73
	1 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	62.412.000	109.377.000	123.682.850	123.784.625	37.454.268	57.584.950	105.067.635	117.474.192	117.933.300	36.995.750	92,27	96,06	94,98	95,27	98,78	-16,27	-14,79
	2 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	10.425.000	25.100.000	19.679.500	17.750.000	20.000.000	10.425.000	23.851.400	18.450.409	17.445.300	19.237.400	100,00	95,03	93,75	98,28	96,19	4,41	2,19
	3 Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling (DAK)	1.847.528.400	1.284.800.000	1.799.990.000	1.833.450.000	2.018.967.000	1.682.568.702	684.100.500	1.307.589.407	1.549.925.828	1.805.473.010	-	53,25	72,64	84,54	89,43	-15,68	5,23

	4	Jambore Institusi Masyarakat Pedesaan	36.553.750					32.006.250					87,56	-	-	-	-	-100,00	-100,00
	5	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB		208.428.000	650.672.500	654.872.725	548.096.000		159.034.487	317.123.718	641.739.800	464.381.600	-	76,30	48,74	97,99	84,73	19,30	18,53
	6	Pelayanan KB Medis Operasi			39.445.575	63.562.450	47.062.011			36.898.876	47.678.025	43.997.561	-	-	93,54	75,01	93,49	-12,96	-26,17
7		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	10.044.000	21.166.000	146.264.350	-	-	9.188.550	17.636.800	143.102.022	-	-	91,48	83,33	97,84	-	-	200,59	234,44
	1	Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	10.044.000	21.166.000	27.170.500			9.188.550	17.636.800	26.409.100			91,48	83,33	97,20	-	-	13,03	13,89
	2	Fasilitas Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya diluar Sekolah			119.093.850					116.692.922			-	-	97,98	-	-	-100,00	-100,00
8		Program Pelayanan Kontrasepsi	49.690.000	78.736.000	-	-	-	47.266.050	61.072.653	-	-	-	95,12	77,57	-	-	-	-20,77	-35,39
	1	Pelayanan KB Medis Operasi	49.690.000	78.736.000				47.266.050	61.072.653				95,12	77,57	-	-	-	-20,77	-35,39
9		Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	30.672.750	45.300.000	-	-	-	29.977.200	43.010.872	-	-	-	97,73	94,95	-	-	-	-26,16	-28,26
	1	Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah	30.672.750	45.300.000				29.977.200	43.010.872				97,73	94,95	-	-	-	-26,16	-28,26
10		Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok BKB	16.507.414	-	-	-	-	30.848.800	-	-	-	-	186,88	-	-	-	-	0,00	0,00
	1	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Balita di Kecamatan	16.507.414	-	-			30.848.800					186,88	-	-	-	-	0,00	0,00
11		Program SDM Terdidik dan Terlatih	-	33.328.750	-	-	-	-	33.328.750	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-100,00	-100,00
	1	Bimtek TOT SDM Peningkatan Ekonomi Keluarga		33.328.750					33.328.750				-	100,00	-	-	-	-100,00	-100,00

12	Program Kerja Sama dengan Mitra Keluarga		-	89.160.250	-	-	-	-	82.637.211	-	-	-	-	92,68	-	-	-	-100,00	-100,00
	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Keluarga		8.160.000					8.101.161				-	99,28	-	-	-	-100,00	-100,00
	2	Penguatan dan Pembinaan PKLK		30.200.250					29.630.250				-	98,11	-	-	-	-100,00	-100,00
	3	Jambore Institusi Masyarakat Pedesaan		50.800.000					44.905.800				-	88,40	-	-	-	-100,00	-100,00
13	Program Advokasi dan Penggerakan		-	91.563.044	457.830.250	-	-	-	79.430.000	444.992.661	-	-	-	86,75	97,20	-	-	150,01	180,12
	1	Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan di Bidang Pengendalian Penduduk dan KB		21.335.700	405.581.250				19.253.550	394.031.520			-	90,24	97,15	-	-	850,48	923,27
	2	Pelayanan Konseling Keluarga Berencana		7.757.200					7.757.200				-	100,00	-	-	-	-100,00	-100,00
	3	Pendataan Keluarga		49.150.144	37.670.000				43.059.300	36.504.322			-	87,61	96,91	-	-	-61,68	-57,61
	4	Pembinaan Monitoring Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan		13.320.000	14.579.000				9.359.950	14.456.819			-	70,27	99,16	-	-	-45,27	-22,77
14	Program Pembinaan Keluarga		-	-	391.619.524	-	-	-	-	343.351.450	-	-	-	-	87,67	-	-	-100,00	-100,00
	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Keluarga			29.587.500					28.057.150			-	-	94,83	-	-	-100,00	-100,00
	2	Penguatan dan Pembinaan PKLK			222.584.774					177.076.090			-	-	79,55	-	-	-100,00	-100,00
	3	Jambore Institusi Masyarakat Pedesaan			139.447.250					138.218.210			-	-	99,12	-	-	-100,00	-100,00
15	Program Pembangunan Keluarga		-	-	-	465.018.923	324.317.750	-	-	-	457.076.214	305.282.850	-	-	-	98,29	94,13	-30,26	-33,21
	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Keluarga				61.589.200	12.379.000				61.316.922	12.271.000	-	-	-	99,56	99,13	-79,90	-79,99
	2	Penguatan dan Pembinaan PKLK				254.405.700	234.729.500				247.848.076	215.802.600	-	-	-	97,42	91,94	-7,73	-12,93
	3	Jambore Institusi Masyarakat Pedesaan				46.457.123	1.432.000				46.203.000	1.432.000	-	-	-	99,45	100,00	-96,92	-96,90

	4	Fasilitas Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya diluar Sekolah				102.566.900	75.777.250				101.708.216	75.777.250	-	-	-	99,16	100,00	-26,12	-25,50
16	Program Pengendalian Penduduk		-	-	-	664.395.553	586.564.000	-	-	-	539.965.442	558.223.419	-	-	-	81,27	95,17	-11,71	3,38
	1	Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				408.616.800	492.989.000				294.111.506	470.645.498	-	-	-	71,98	95,47	20,65	60,02
	2	Pendataan Keluarga				180.888.753	8.243.500				178.337.779	7.915.500	-	-	-	98,59	96,02	-95,44	-95,56
	3	Pembinaan Monitoring Evaluasi Poencatatan dan Pelaporan				16.651.000					14.738.850		-	-	-	88,52	-	-100,00	-100,00
	4	Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) tentang Program Kesehatan Reproduksi Remaja				58.239.000	50.000.000				52.777.307	44.330.921	-	-	-	90,62	88,66	-14,15	-16,00
	4	Penguatan dan Perluasan Pendidikan Kependudukan					2.567.000					2.567.000	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00
	4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga					32.764.500					32.764.500	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00
TOTAL			2.881.892.308	2.829.476.685	4.457.588.183	4.627.310.576	4.181.888.006	2.629.428.048	2.118.189.023	3.506.547.264	4.162.836.354	3.803.667.797	91,24	74,86	78,66	89,96	90,96	-10,02	-8,76

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat dalam rangka membangun Pemerintah Kabupaten Sijunjung sebagai pelaksana dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kerencana.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara universal yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, teknologi, politik dan ideologi dan bersifat konprehensif bagi masyarakat.

Dalam suatu kegiatan perencanaan pembangunan merupakan kunci utama dari siklus manajemen pembangunan. Perencanaan pembangunan harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pembangunan masyarakat, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat harus peka dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik (*good governance*).

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis dilingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

- Kurang diminatinya KIE melalui media pemutaran Film;
- Tingkat kesertaan PUS untuk memakai alat kontrasepsi MKJP masih rendah;

- Kurangnya Tenaga Penyuluh KB dilapangan sehingga program dan kegiatan tidak tergarap dengan maksimal;
- Kemandirian ekonomi bagi anggota UPPKS di Kabupaten/Kota belum tampak;
- Ketersediaan Data Basis belum dimanfaatkan dengan maksimal dalam menetapkan perencanaan/kebijakan program dan kegiatan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat menjadi pendorong adalah sebagai berikut :

- Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendukung program Bangga Kencana;
- Tingginya kesadaran dan partisipasi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Kader terhadap program Bangga Kencana;
- Tersedianya sarana yang memadai untuk melakukan advokasi, fasilitasi, koordinasi dan KIE program Bangga Kencana;
- Banyaknya lembaga organisasi masyarakat sebagai mitra kerja yang peduli terhadap program Bangga Kencana dalam rangka mencapai keluarga berkualitas.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/ masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, OPD, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di dalam organisasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sijunjung, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat secara adat bahwa banyak anak, banyak rejeki. Yang sebenarnya tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi saat ini dimana biaya kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Selain itu, apabila suatu keluarga belum memiliki anak perempuan sebagai penerus, keluarga tersebut akan berusaha terus untuk mendapatkan anak yang diinginkannya. Angka kelahiran di Kabupaten Sijunjung masih tinggi yaitu sebesar 2,95 (*sumber data: Survey Sosial Ekonomi Nasional 2019 oleh BPS*) artinya setiap keluarga rata-rata memiliki jumlah anak yaitu 3 orang;
2. Tingkat kesertaan ber KB PUS (Pasangan Usia Subur) belum optimal, masih banyak yang tidak memakai kontrasepsi terutama yang

menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Peserta KB Aktif yang MKJP di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sebesar 31.117 PUS (12,03%) dari jumlah PUS yang ada yaitu 42.946 PUS (*sumber data: laporan bulanan PLKB Tahun 2020*). Jadi, masih ada sekitar 5.166 PUS yang tidak memakai kontrasepsi;

3. Kurangnya SDM kader dalam mengolah program KKBPK sehingga mekanisme operasional tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena seringnya pergantian kader oleh wali nagari sehingga banyak dari kader tersebut masih relatif baru menjadi kader, sehingga mereka belum memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat;
4. Advokasi dan KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) tentang Program KB belum optimal. Banyak kalangan beranggapan program KB sebagai program konsumtif dan tidak begitu penting karena dampaknya tidak terlihat langsung saat ini. Manfaat program KB tidak semata-mata untuk saat ini saja, akan tetapi merupakan investasi untuk masa yang akan datang. Karena melalui pengendalian jumlah penduduk, kesehatan ibu dan anak akan lebih terjaga, keluarga lebih harmonis, kebutuhan hidup keluarga lebih tercukupi dan pada tahap selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga;
5. Partisipasi pria dalam ber-KB masih sangat rendah. Hal ini selain disebabkan oleh keterbatasan macam dan jenis alat kontrasepsi laki-laki, juga oleh keterbatasan pengetahuan mereka akan hak-hak dan kesehatan reproduksi;
6. Penumbuhan dan pengembangan kelompok ekonomi produktif melalui UPPKS sulit dilaksanakan karena sebagian besar kelompok sudah bubar dan tidak aktif berusaha. Untuk penumbuhan dan pengembangan kelompok produktif melalui UPPKS ternyata para pelaksana UPPKS mengalami kesulitan dibidang modal dan biaya untuk mengembangkan usaha mereka, sehingga untuk memajukan usaha mereka sangat sulit diupayakan, serta hasil yang telah diciptakan dibidang usahanya tersebut juga mengalami kesulitan dibidang pemasaran serta kurangnya keahlian untuk melakukan inovasi dan kreasi dibidang usaha-usaha mereka sehingga produk yang dihasilkan kalah bersaing di pemasaran.
7. Perlunya pemutahiran data dan informasi keluarga yang akurat setiap tahun;

8. Kurangnya tenaga penyuluh keluarga berencana dibandingkan dengan luas wilayah, hal ini terbukti saat ini jumlah tenaga Penyuluh KB hanya 17 Orang, harusnya jumlah mereka adalah 62 Orang, dimana sesuai dengan ketentuan bahwa satu orang Penyuluh/PLKB membina 1 desa/nagari, berarti masih ada kekurangan tenaga Penyuluh KB sebanyak 45 Orang lagi.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

Esensi dari pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, hal tersebut telah diamanatkan dalam pasal 18 ayat(2) dan (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Peran Kepala Daerah sangat strategis melalui kewenangannya untuk pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia guna kepentingan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran rakyatnya, Kepala Daerah mesti visioner untuk membangun daerah dalam mengelola tata pemerintahan yang baik menuju masyarakat madani yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

3.2.1 VISI.

Untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sijunjung harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang sehingga arah dan tujuan dari pembangunan itu dapat terwujud dan terlaksana sebagaimana mestinya dan perlu ditetapkan melalui suatu visi sehingga kedepan tujuan pembangunan oleh pemerintah dapat terwujud, visi Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 akan mengacu pada visi yang telah tercantum pada Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sijunjung 2005 – 2025 yakni ; ***"Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sijunjung yang madani"***. Bertolak dari visi Kabupaten Sijunjung pada RPJP 2005-2025 maka visi Kabupaten Sijunjung 2021-2026 adalah; ***"Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya Menuju Masyarakat yang Madani"***. Yang dapat diartikan sebagai berikut :

Kabupaten Sijunjung : Terwujudnya kualitas sumber daya manusia Sijunjung yang didukung dengan kelayakan tingkat

Sejahtera	kesejahteraan ekonomi dalam keseimbangan dan perlindungan lingkungan hidup serta tingkat kesejahteraan sosial budaya masyarakat, ditandai meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita masyarakat & nilai tukar petani serta menurunnya tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka & indeks ketimpangan pembangunan.
Kab. Sijunjung Unggul	: Terwujudnya kemampuan dan kekuatan sesuai dengan potensi yang ada untuk mewujudkan keunggulan komparatif dan kompetitif, sehingga Kab. Sijunjung unggul secara kualitas pembangunan ditingkat regional dan nasional yang ditandai meningkatnya posisi relatif daerah terhadap rata-rata provinsi dan nasional.
Kab. Sijunjung Berbudaya	: Terwujudnya masyarakat yang berpendidikan, sopan dan berbudi pekerti luhur, berakhlak dan berkesopanan serta memiliki rasa toleransi sesuai dengan falsafah adat minangkabau “adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah” yang ditandai berkurangnya konflik & sengketa antar adat/nagari .
Masyarakat Madani	: Masyarakat yang beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat demokratis, serta yang maju dan menguasai ilmu pengetahuan, dan teknologi.

3.2.2 MISI.

Untuk melaksanakan suatu visi pemerintah daerah perlu ditetapkan dengan suatu misi yang sangat memungkinkan untuk mencapai suatu program tahapan pembangunan oleh pemerintah, maka perumusan misi yang dibuat untuk dipedomani untuk mewujudkan misi tersebut sebagai berikut :

1. Kelembagaan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi birokrasi;
2. Daya Saing Ekonomi : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata;
3. Kesejahteraan Sosial : Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK);

4. Pembangunan Berkelanjutan : Meningkatkan kualitas infrastruktur dan prasarana dasar serta pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan.

3.2.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.

Untuk fokusnya pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Sijunjung 2021–2026 terhadap agenda dan prioritas dalam pembangunan daerah, maka dirumuskan sebanyak 4 (empat) prioritas pembangunan Daerah yang meliputi :

1. Mewujudkan birokrasi yang adaptif, efektif, efisien, akuntabel, transparan, inovatif & berdaya saing;
2. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah serta menurunkan angka kemiskinan & pengangguran;
3. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia;
4. Meningkatkan kuantitas & kualitas infrastruktur wilayah serta prasarana dasar & pemanfaatan SDA berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2021– 2026, Agenda dan prioritas pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berhubungan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), adapun agenda tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pengendalian Penduduk;
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.

Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar

tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD Kabupaten sebagai berikut :

- Faktor Penghambat :
 - Terbatasnya dukungan dana dari kementrian/lembaga dan daerah;
 - Adanya aturan-aturan yang dikeluarkan kementrian dan lembaga (Juknis) yang tidak mengakomodir kebutuhan di daerah;
 - Kurang sinkron antara menu yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan kebutuhan di daerah.
- Faktor Pendorong :
 - Adanya kepedulian Pemerintah Pusat.
 - Adanya dukungan dana dari kementrian/lembaga.
 - Adanya kerangka acuan kegiatan;
 - Adanya aturan-aturan yang dikeluarkan kementrian dan lembaga (Juknis) mengatur pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW, sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

- ❖ Kurangnya ruang bermain, berolahraga bagi anak dan remaja;
- ❖ Terlalu luasnya wilayah Kabupaten Sijunjung dengan kondisi geografis yang cukup sulit sehingga berpengaruh dalam pembagian kerja khususnya Penyuluh KB;
- ❖ Kurangnya jumlah zona selamat sekolah.

Faktor Pendorong :

- ❖ Adanya pembagian tataruang yang jelas dari pemerintah daerah.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.

Dalam mewujudkan program pembangunan nasional dan program pembangunan daerah perlu disikapi dan ditindak lanjuti isu-isu pembangunan

yang terjadi saat ini dan yang akan datang sehingga program pembangunan tersebut dapat terwujud sebagaimana mestinya, adapun isu-isu yang berkembang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung saat ini adalah sebagai berikut :

1. Bonus Demografi.

Pembangunan Indonesia dalam periode 2020-2024 ditujukan untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan diarahkan diantaranya melalui peningkatan produktivitas angkatan kerja, serta peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda.

Salah satu faktor penentu terciptanya struktur penduduk yang diinginkan adalah pengendalian angka kelahiran total/total fertility rate (TFR). Selama lima tahun terakhir, TFR mengalami penurunan dari 2,91 anak per WUS (Wanita Usia Subur) 15-49 tahun (SP 2010), menjadi 2,48 (SDKI 2017). Namun dua tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu 2,51 (SKAP 2018) dan 2,68 (SKAP 2019).

Dalam jangka waktu yang relatif panjang, angka kelahiran ini menjadi salah satu penentu struktur penduduk. Struktur penduduk Indonesia saat ini ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk usia produktif. Kondisi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi (demographic dividen) dengan salah satu prasyarat yang harus terpenuhi, yaitu tersedianya SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Struktur penduduk seperti ini harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya adalah dengan menjaga agar TFR berada pada level tertentu sehingga bonus demografi dapat menjadi suatu kondisi yang dapat dimanfaatkan dalam lintas sektor pembangunan.



2. Satu Data Kependudukan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, tata kelola data pemerintah ditujukan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pendataan Keluarga (PK) yang menjadi tugas dan kewenangan BKKBN, harus dapat diintegrasikan

dengan data sektor lain, seperti Sensus Penduduk (SP) dan Data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sehingga dapat terwujud satu data yang lengkap sehingga dapat digunakan untuk mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, serta untuk mendukung operasionalisasi Program Bangga Kencana di lini lapangan.

3. Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi:

Kondisi kesehatan ibu dan anak juga belum menunjukkan hal yang menggembirakan, dimana Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015), sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI, 2017). Situasi ini harus mendapat perhatian khusus serta membutuhkan kerja keras bersama (lintas sektor dan melibatkan pihak swasta dan masyarakat) untuk terus menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia sebagaimana target yang ditetapkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

BKKBN sebagai K/L yang berkontribusi dalam Kegiatan Prioritas Nasional Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KN dan Kesehatan Reproduksi perlu merumuskan strategi program/ kegiatan yang spesifik dalam penanganan AKI dan AKB ini. Salah satu penyebab tingginya AKI adalah 4 (empat) terlalu, yakni terlalu muda, terlalu banyak, terlalu dekat, dan terlalu tua. Kehamilan yang tidak diinginkan di usia muda akan sangat beresiko pada kematian atau dapat berdampak buruk pada bayi yang dikandungnya. Risiko tersebut dapat diminimalkan dengan operasionalisasi Program Bangga Kencana yang tepat. Salah satunya dengan memastikan individu maupun pasangan memiliki akses terhadap informasi KB dan Kesehatan Reproduksi, layanan KB untuk merencanakan waktu dan jarak kehamilan, serta jumlah anak yang ideal.

Kecamatan Subdistrict		Angka Kematian Bayi Infant Mortality (per 1000)	Angka Kematian Ibu Maternal Mortality (per 1000)	Angka Kematian Anak Balita Childhood Mortality (per 1000)
(1)		(2)	(3)	(3)
Sijunjung	2019	...	...	...
	2018	15,84	113	18,33
	2017	19,00	142,5	20,40
	2016	17,00	95,00	18,00
	2015	13,11	75,54	0,92

4. Penurunan penggunaan kontrasepsi modern.

Penggunaan kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) menurun dari 57,9 persen (SDKI 2012) menjadi 57,2 persen (SDKI 2017). Penurunan tertinggi bahkan terjadi pada segmen usia 15 tahun hingga 29 tahun yang merosot hingga 4 persen. Diperkirakan 2 (dua) penyebab utama menurunnya jumlah pengguna kontrasepsi modern, khususnya di kalangan kelompok usia produktif/pasangan usia muda adalah masih rendahnya pengetahuan pasangan muda terhadap kesehatan reproduksi dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan kepercayaan terhadap alat kontrasepsi, terutama alat kontrasepsi modern.

Diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan mCPR, diantaranya melalui peningkatan akses layanan kontrasepsi dan perluasan akses/jangkauan pelayanan KB (melalui penggerakan Penyuluh Keluarga Berencana/ PKB dan pelayanan KB bergerak), serta peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi dan pengetahuan tentang kontrasepsi modern. Selain itu, untuk menasar pasangan usia muda/pasangan milenial, perlu peningkatan kesadaran generasi muda terkait kesehatan reproduksi. Informasi Program Bangga Kencana digital yang dikemas secara menarik juga dapat menjadi salah satu cara yang lebih tepat di era digitalisasi saat ini.

5. Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga.

Kesehatan Reproduksi Remaja merupakan topik yang perlu diketahui oleh masyarakat khususnya pada remaja agar mereka memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada di sekitarnya, sehingga diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab.

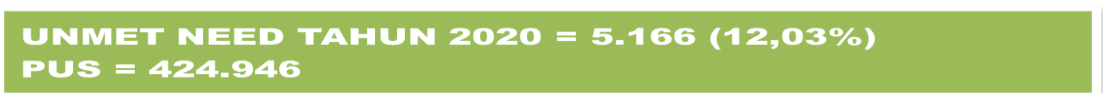
Kurangnya sosialisasi dan edukasi kesehatan reproduksi dapat memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, diantaranya penyakit seksual menular, kehamilan di usia muda, hingga aborsi yang dapat mengakibatkan morbiditas bahkan mortalitas ibu. Angka kelahiran umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) juga masih relatif tinggi, meskipun penurunannya cukup signifikan dari tahun ke tahun.

Kendala yang masih ada yaitu rendahnya pemahaman remaja dan calon pengantin terkait kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Pemberian informasi yang disesuaikan dengan usia dan kesiapan anak/remaja dapat meningkatkan pemahaman mereka atas sistem, proses, fungsi alat reproduksi dan cara menjaga kesehatan reproduksinya, serta meningkatkan pemahaman atas konsep perencanaan kehidupan berkeluarga.



6. Kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani (unmet need) di Sumatera Barat dikategorikan masih tinggi.

Selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, unmet need terus mengalami penurunan walaupun terjadi fluktuasi di antara tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2015, posisi unmet need sebesar 18,3 persen (Supas 2015), turun menjadi 15,8 persen pada tahun 2016, naik menjadi 17,50 persen pada tahun 2017 dan kembali turun menjadi 12,4 persen pada tahun 2018 (Survei PPJMN/SKAP 2016-2018). Dengan memperhatikan karakteristik social budaya, diketahui bahwa unmet need lebih tinggi di daerah perkotaan (11 persen) dibandingkan dengan daerah pedesaan (10 persen). 23 persen wanita tidak mau ber-KB karena alasan kekhawatiran terhadap efek samping, sedangkan pada kalangan pria, ada 32 persen pria yang dirinya ataupun isterinya tidak menggunakan alat kontrasepsi dengan alasan tidak ingin ber-KB.



7. Prevalensi stunting masih tinggi.

Stunting (gagal tumbuh) merupakan ancaman utama terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak yang gagal tumbuh ini, bukan hanya mengganggu pertumbuhan fisik saja, tetapi juga mengganggu perkembangan otaknya. Hal ini selain mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, juga mempengaruhi produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. Di Indonesia, angka prevalensi stunting masih cenderung tinggi, yaitu 37,2 persen pada tahun 2013. Walau angka tersebut sudah

mengalami penurunan menjadi 30,8 persen pada tahun 2018, pemerintah tetap harus memberikan perhatian serius terhadap isu ini, sehingga anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetensi di tingkat global.

Hal lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah perlunya edukasi/sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai bekal memasuki kehidupan berkeluarga, agar para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, dengan memeriksakan kandungan minimal empat kali selama kehamilan (program 1000 HPK) serta peningkatan pemahaman orangtua mengenai pola asuh yang baik dan menjaga kesehatan lingkungan.

8. Pernikahan Usia Anak.

Kasus pernikahan usia anak banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dan telah menjadi perhatian internasional, mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan anak yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia anak, kehamilan pada usia yang sangat muda, gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran, infeksi penyakit menular seksual, serta risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia yang relatif sangat muda.

Meskipun angka pernikahan anak mengalami penurunan secara bertahap dari 33 persen pada tahun 1985, 26 persen pada tahun 2010, dan 23 persen pada tahun 2016, namun prevalensinya masih relatif konstan.

Prevalensi atau angka kejadian pernikahan anak lebih banyak terjadi di perdesaan dengan angka 27,1 persen dibandingkan dengan di perkotaan (17,1 persen). Permasalahan lain, perkawinan anak di bawah usia 15 tahun tidak mencerminkan prevalensi yang sesungguhnya, karena banyak perkawinan disamarkan sebagai perkawinan anak perempuan di atas 16 tahun. Perkawinan anak juga kan berdampak besar pada generasi selanjutnya yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan sehingga mengakibatkan sulitnya akses terhadap fasilitas penunjang keterampilan dan pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan, pangan dan gizi serta akses terhadap lingkungan tempat tinggal yang kondusif. Langkah penanggulangan

isu ini antara lain dapat melalui penanaman norma sosial dan budaya penundaan usia menikah melalui keluarga (orangtua), kelompok kegiatan, pendidikan/sosialisasi kesehatan reproduksi melalui sekolah/guru, serta tokoh agama/tokoh masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021–2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumusan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan kinerja Organisasi yang akuntabel	Meningkatnya kinerja Organisasi yang akuntabel	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	73,37	74,50	75,00	76,50	77,00	78,30
2.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, "Bangga Kencana"	1. Meningkatkan Implementasi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pengendalian Penduduk	1. Total Fertility Rate (TFR)	2,22	2,22	2,22	2,22	2,15	2,15
			2. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	53,69	53,75	53,85	54,00	54,50	55,00
		2. Meningkatkan Akses Dan Kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi	1. Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)	73,85	75,24	76,63	78,02	79,41	80,80
			2. Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	12,00	11,76	11,52	11,28	11,00	10,08
			3. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	20,31	20,50	20,75	21,00	21,75	22,00
		3. Meningkatkan Kualitas Keluarga	1. Persentase Remaja, Ibu Hamil, dan Ibu Baduta yang mendapatkan KIE Stunting	30,90	33,71	36,52	36,52	39,33	42,13

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI.

Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pencapaian kondisi penduduk tumbuh seimbang dan memacu kepada RPJMD Kabupaten Sijunjung serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Advokasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder);
- 2) Menjamin Ketersediaan dan pemanfaatan parameter kependudukan;
- 3) Meningkatkan Komunikasi, informasi dan aplikasi (KIE) program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
- 4) Meningkatkan kemitraan dalam program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
- 5) Meningkatkan jaminan ketersediaan sarana dan prasarana;
- 6) Menyeraskan kebijakan Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
- 7) Meningkatkan penelitian dan pengembangan Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
- 8) Meningkatkan pemanfaatan sistem manajemen informasi (SIM) berbasis teknologi informasi, dan komunikasi (TIK);
- 9) Perencanaan dan pengembangan SDM aparatur;
- 10) Penataan organisasi dan tata laksana;
- 11) Pengembangan budaya kerja cerdas, ulet, dan kemitraan (CUK);
- 12) Memastikan efisiensi anggaran.

5.2 KEBIJAKAN.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, diperlukan strategi dan kebijakan – kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana.

Dalam meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana kedepan kepada para petugas pelayanan, kader-kader di Kecamatan Nagari ataupun Jorong perlu dilakukan pembinaan-pembinaan sehingga pelayanan Keluarga Berencana betul-betul berkualitas dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga dan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kualitas ketahanan keluarga dan masyarakat perlu dilakukan pembinaan-pembinaan dan pelatihan-pelatihan serta sosialisasi sehingga masyarakat akan lebih tahu tentang peran fungsi keluarga, ketahanan keluarga dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945.

3. Meningkatkan akses terhadap informasi pelayanan kesehatan reproduksi remaja.

Untuk menunjang terhadap pelayanan kesehatan reproduksi remaja perlu dilakukan pembinaan-pembinaan melalui media masa dan elektronik sehingga pelayanan kesehatan reproduksi remaja dapat langsung dirasakan oleh remaja dan masyarakat pada umumnya.

4. Mengintegrasikan Pelaksanaan Program Bangga Kencana.

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelayanan program Bangga Kencana perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama antar instansi sehingga pelayanan Program Bangga Kencana dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

5. Meningkatkan tingkat kemandirian masyarakat dalam ber KB.

Dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dalam ber KB perlu dilakukan pembinaan-pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat akan penting dan perlunya kita ber KB sehingga masyarakat akan lebih paham tentang manfaat ber KB dan dengan sendirinya tingkat kesadaran/kemandirian masyarakat juga akan semakin meningkat.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

VISI	: Kabupaten Sijunjung Yang Sejahtera, Unggul Dan Berbudaya Menuju Masyarakat Madani				
MISI I	: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi birokrasi				
TUJUAN (1)	SASARAN (2)		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan birokrasi yang berkinerja & akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi	1	Meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Organisasi	1	Peningkatan kualitas pelaporan kinerja & evaluasi Nilai Akuntabilitas Kinerja secara efektif
Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat dan produktif					
MISI III	: berbasis teknologi dalam tatanan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulah (ABS-SBK)				
TUJUAN (1)	SASARAN (2)		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana "Bangga Kencana"	Meningkatnya implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk	1	Meningkatkan Pelaksanaan Program Bangga Kencana di Seluruh Tingkatan Wilayah	1	Pengimplementasi an kebijakan dan strategi pengendalian penduduk
				2	Penguatan Advokasi dan KIE terhadap isu kependudukan
				3	Penguatan advokasi dan KIE terhadap pengambil kebijakan
	Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggara an Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	2	Meningkatnya Kesertaan Keluarga dalam Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi	1	Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR
				2	Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR
				3	Peningkatan KB Pria
				4	Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang

					tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP)
				5	Peningkatan kemandirian PUS dalam ber-KB
	Meningkatnya Kualitas Keluarga	3	Meningkatkan Kualitas KIE dalam rangka Memperkuat Ketahanan, Kesejahteraan, Dan Karakter Keluarga	1	Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga
				2	Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga
				3	Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja
				4	Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri di wilayah Kampung KB
				5	Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan

				6	Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga
				7	Peningkatan Promosi Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam rangka pencegahan stunting
				8	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional perlu dibuat suatu konsep atau rencana yang matang sehingga program atau kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan antara lain melalui program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga arah dan tujuan dari pembangunan tersebut dapat terwujud dan terlaksana dengan baik.

Dengan ditetapkannya program pembangunan nasional dan program pembangunan daerah tidak terlepas dari sarana dan prasarana serta biaya sehingga untuk mewujudkan program pembangunan nasional dan program pembangunan daerah tersebut harus dilakukan evaluasi dan revisi sesuai dengan kebutuhan dan keadaan serta standar dari setiap program atau kegiatan tersebut dilaksanakan.

Agar pelaksanaan program pembangunan nasional dan program pembangunan daerah tersebut dapat terwujud dengan baik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung telah membuat program dan rencana serta biaya sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang disediakan oleh Pemerintah daerah melalui OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

TABEL 6.1																														
RENCANA PROGRAM , KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIJUNJUNG																														
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEPANOKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI						
											2021		2022		2023		2024		2025						2026					
											Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4					5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
											DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																			
Meningkatkan birokrasi yang berkinerja & akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	2	14	01				PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	3.073	100	3.494	100	3.581	100	3.931	100	4.044	100	4.140	100	4.140	DPP & KB	Kab. Sijunjung			
			2	14	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100	100	16	100	45	100	42	100	63	100	75	100	80	100	80	DPP & KB	Kab. Sijunjung				
			2	14	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	n/a	4	15	3	15	3	15	3	20	3	20	3	25	3	25	DPP & KB	Kab. Sijunjung			
			2	14	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	n/a	-	-	2	15	2	7	2	15	2	20	2	20	2	20	DPP & KB	Kab. Sijunjung			
			2	14	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	n/a	-	-	-	-	2	5	2	15	2	20	2	20	2	20	DPP & KB	Kab. Sijunjung			
			2	14	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Bhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Bhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Bhtisar Realisasi Kinerja SKPD	n/a	2	1	1	15	1	10	1	8	1	10	1	10	1	10	DPP & KB	Kab. Sijunjung			
			2	14	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a	-	-	-	-	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	DPP & KB	Kab. Sijunjung			
			2	14	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	2.732	100	2.659	100	2.673	100	2.905	100	3.005	100	3.060	100	3.060	DPP & KB	Kab. Sijunjung			
			2	14	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	n/a	20	2.652	20	2.579	20	2.579	20	2.800	20	2.900	20	2.950	20	2.950	DPP & KB	Kab. Sijunjung			
			2	14	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	n/a	2	28	-	-	1	35	1	20	1	20	1	20	1	20	DPP & KB	Kab. Sijunjung			
			2	14	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	n/a	12	52	18	80	18	52	18	80	18	80	18	85	18	85	DPP & KB	Kab. Sijunjung			
			2	14	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	n/a	12	0,2	-	-	30	7	30	5	30	5	30	5	30	5	DPP & KB	Kab. Sijunjung			
			2	14	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100	-	-	100	-	100	10	100	10	100	10	100	10	100	100	DPP & KB	Kab. Sijunjung			
			2	14	01	2	03	05	Pekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	n/a	-	-	-	-	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10	DPP & KB	Kab. Sijunjung			
			2	14	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Milik Daerah	100	-	-	100	58	100	44	100	85	100	85	100	85	100	85	DPP & KB	Kab. Sijunjung			
			2	14	01	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	n/a	-	-	1	7	1	7	1	10	1	10	1	10	1	10	DPP & KB	Kab. Sijunjung			
			2	14	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	n/a	-	-	32	16	32	10	32	30	32	30	32	30	32	30	DPP & KB	Kab. Sijunjung			
			2	14	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	n/a	-	-	-	-	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	DPP & KB	Kab. Sijunjung			

2	14	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	n/a	-	-	-	-	5	6	5	5	5	5	5	5	5	DPP & KB	Kab. Sijunjung	
2	14	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	n/a	-	-	5	35	5	15	5	35	5	35	5	35	5	35	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	159	100	336	100	300	100	392	100	393	100	409	100	409	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	n/a	-	-	-	-	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	-	-	-	-	5	6	5	10	5	10	5	10	5	10	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	n/a	12	11	12	13	12	5	12	16	12	17	12	18	12	18	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	n/a	12	57	12	80	12	60	12	100	12	100	12	100	12	100	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	n/a	12	12	12	35	12	20	12	85	12	85	12	90	12	90	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	n/a	-	-	12	3	12	5	12	4	12	4	12	4	12	4	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	n/a	-	-	12	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a	1	79	1	150	1	150	1	160	1	160	1	170	1	170	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	n/a	-	-	4	45	4	40	-	-	-	-	-	-	-	-	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100	100	14	100	62	100	153	100	45	100	45	100	45	100	45	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n/a	-	-	-	-	6	120	1	30	1	30	1	30	1	30	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	n/a	-	-	1	60	2	23	4	15	4	15	4	15	4	15	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a	1	14	1	2	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	41	100	39	100	61	100	57	100	57	100	57	100	57	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	n/a	-	-	-	-	12	2	12	2	12	2	12	2	12	2	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	n/a	3	25	3	25	3	25	3	25	3	25	3	25	3	25	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	-	-	-	-	12	10	12	15	12	15	12	15	12	15	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	n/a	12	16	12	14	12	24	12	15	12	15	12	15	12	15	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berondisi baik	100	100	111	100	295	100	298	100	374	100	374	100	394	100	394	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	n/a	38	104	38	190	38	190	38	260	38	260	38	275	38	275	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	n/a	53	7	53	50	53	50	53	50	53	50	53	50	53	50	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	-	-	-	-	1	3	1	4	1	4	1	4	1	4	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	-	-	1	55	1	55	1	60	1	60	1	65	1	65	DPP & KB	Kab. Sijunjung

2	14	02				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2,95	2,22	29	2,22	152	2,22	199	2,22	260	2,15	270	2,15	279	2,15	279	DPP & KB	Kab. Sijunjung
							Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	n/a	53,69	179	53,75	649	53,85	630	54,00	670	54,50	670	55,00	670	55,00	670	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	02	2	01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	n/a	100	29	100	152	100	199	100	260	100	270	100	279	100	279	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	02	2	01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	n/a	-	-	-	-	3	5	3	10	3	15	3	15	3	15	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	02	2	01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	n/a	-	-	1	50	5	15	5	15	5	20	5	20	5	20	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	02	2	01	03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	n/a	-	-	-	-	2	5	5	10	5	10	5	10	5	10	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	02	2	01	04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	n/a	-	-	-	-	1	25	1	30	1	30	1	30	1	30	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	02	2	01	05	Penguatan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	n/a	-	-	-	-	2	5	2	10	2	10	2	10	2	10	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	02	2	01	06	Penguatan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	n/a	-	-	-	-	2	5	2	10	2	10	2	10	2	10	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	02	2	01	07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	n/a	-	-	-	-	2	5	2	10	2	10	2	10	2	10	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	02	2	01	08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	n/a	-	-	-	-	2	5	2	10	2	10	2	10	2	10	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	02	2	01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non	n/a	4	17	4	42	6	30	9	35	12	35	12	35	12	35	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	02	2	01	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	n/a	-	-	-	-	2	5	4	10	12	10	12	10	12	10	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	02	2	01	11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat	n/a	-	-	-	-	2	5	4	10	8	10	8	10	8	10	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	02	2	01	12	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku	n/a	-	-	-	-	2	4	5	10	5	10	5	19	5	19	DPP & KB	Kab. Sijunjung

2	14	02	2	01	13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku	n/a	-	-	-	-	2	10	4	15	9	15	9	15	9	15	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	02	2	01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	n/a	-	-	-	-	6	15	6	15	9	15	9	15	9	15	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	02	2	01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	n/a	8	12	8	60	8	60	8	60	10	60	10	60	10	60	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	02	2	02		Pemetaan Perkiraan Penduduk Cakupan Kabupaten/Kota	Persentase Pemetaan Perkiraan Penduduk Cakupan Daerah	92,23	92,23	179	93,00	649	94,00	630	95,00	670	96,00	670	97,00	670	97,00	670	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	02	2	02	01	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	n/a	-	-	3	30	3	45	3	45	3	45	3	45	3	45	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	02	2	02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	n/a	-	-	1	200	-	-	1	41	1	41	1	41	1	41	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	02	2	02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	n/a	1	17	1	45	1	45	1	45	1	45	1	45	1	45	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	02	2	02	04	Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	n/a	-	-	-	-	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	02	2	02	05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	n/a	-	-	1	80	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	02	2	02	06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	n/a	-	-	-	-	1	26	1	25	1	25	1	25	1	25	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	02	2	02	07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	Jumlah kerentanan dampak kependudukan	n/a	-	-	-	-	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	02	2	02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang	n/a	26	24	26	45	26	45	26	45	26	45	26	45	26	45	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	02	2	02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	n/a	-	-	-	-	18	25	18	25	18	25	18	25	18	25	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	02	2	02	10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	n/a	-	-	-	-	9	20	9	20	9	20	9	20	9	20	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	02	2	02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	n/a	-	-	-	-	34	10	34	10	34	10	34	10	34	10	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	02	2	02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	n/a	2	138	2	228	2	253	2	253	2	253	2	253	2	253	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	02	2	02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	n/a	-	-	-	-	12	55	12	55	12	55	12	55	12	55	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	02	2	02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	n/a	-	-	12	21	12	21	12	21	12	21	12	21	12	21	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	03				PROGRAM PEM BINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevelensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	72,46	73,85	1.692	75,24	340	76,63	335	78,02	352	79,41	352	80,80	361	80,80	361	DPP & KB	Kab. Sijunjung
							Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	12,03	12,00	1.228	11,76	299	11,52	337	11,28	401	11,00	411	10,08	411	10,08	411		
							Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	20,31	20,31	511	20,50	145	20,75	140	21,00	157	21,75	157	22,00	157	22,00	157		

2	14	03	2	01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan KIE Program Bangga Kencana	n/a	5.900	922	6.000	219	6.200	179	6.300	213	6.500	218	6.700	218	6.700	218	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	03	2	01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	n/a	-	-	-	-	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	03	2	01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	n/a	-	-	-	-	3	10	3	16	3	16	3	16	3	16	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	03	2	01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	n/a	3	163	3	6	3	6	2	9	2	9	2	9	2	9	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	03	2	01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media	n/a	-	-	1	28	1	15	1	20	1	20	1	20	1	20	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	03	2	01	05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Media cetak, elektronik dan media lainnya yang digunakan sesuai kearifan lokal dalam pencitraan program KKBPK	n/a	-	-	-	-	1	10	1	15	1	20	1	20	1	20	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	03	2	01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokalcarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini	n/a	-	-	-	-	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	03	2	01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	n/a	8	759	8	185	8	85	8	85	8	85	8	85	8	85	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	03	2	01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	n/a	-	-	-	-	12	20	12	35	12	35	12	35	12	35	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	03	2	02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pencapaian Kinerja PKB/PLKB	n/a	80	306	82	80	86	158	88	188	90	193	95	193	95	193	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	03	2	02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	n/a	-	-	-	-	80	50	80	55	80	55	80	55	80	55	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	03	2	02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	n/a	-	-	-	-	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	03	2	02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Pyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Pyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	n/a	-	-	-	-	6	18	6	23	6	28	6	28	6	28	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	03	2	02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	n/a	200	306	40	80	40	50	40	70	40	70	40	70	40	70	DPP & KB	Kab. Sijunjung

2	14	03	2	03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes	100	100,00	1.692	100,00	340	100,00	335	100,00	352	100,00	352	100,00	361	100,00	361	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	03	2	03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	n/a	13	76	13	100	17	50	17	50	17	50	17	50	17	50	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	03	2	03	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	n/a	-	-	-	-	18	13	18	18	18	18	18	18	18	18	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	03	2	03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	n/a	40	619	1.178	110	1.178	75	1.178	75	1.178	75	1.178	75	1.178	75	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	03	2	03	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	n/a	-	-	5	20	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	03	2	03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	n/a	-	-	13	20	13	10	13	10	13	10	13	10	13	10	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	03	2	03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	n/a	8	997	8	60	8	50	8	50	8	50	8	50	8	50	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	03	2	03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	n/a	-	-	-	-	1.178	10	1.178	10	1.178	10	1.178	10	1.178	10	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	03	2	03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	n/a	-	-	-	-	42	4	42	4	42	4	42	13	42	13	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	03	2	03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	n/a	-	-	-	-	21	37	21	47	21	47	21	47	21	47	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	03	2	03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	n/a	-	-	-	-	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	03	2	03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	n/a	-	-	-	-	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	03	2	03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	n/a	-	-	400	30	400	30	400	30	400	30	400	30	400	30	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	03	2	03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria	n/a	-	-	-	-	6	6	7	8	8	8	9	8	9	8	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	03	2	04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Tingkat Partisipasi Ormas dalam Pelaksanaan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	n/a	100,00	511	100,00	145	100,00	140	100,00	157	100,00	157	100,00	157	100,00	157	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	03	2	04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	n/a	3	25	3	72	3	45	3	47	3	47	3	47	3	47	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	03	2	04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	n/a	-	-	-	-	1	20	1	25	1	25	1	25	1	25	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	03	2	04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKEPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung	n/a	26	486	26	58	26	60	26	70	26	70	26	70	26	70	DPP & KB	Kab. Sijunjung

2	14	03	2	04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	n/a	-	-	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	04				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Remaja, Ibu Hamil, Ibu Baduta yang mendapatkan KIE Stunting	28,09	30,90	1.205	33,71	626	36,52	648	36,52	727	39,33	735	42,13	742	42,13	742	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	04	2	01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan yang mendapatkan KIE	n/a	28	1.150	31	506	34	508	37	552	39	555	42	555	42	555	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	04	2	01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang Dibentuk	n/a	-	-	24	40	10	42	10	45	10	45	10	45	10	45	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	04	2	01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	n/a	20	284	10	10	20	10	20	11	20	11	20	11	20	11	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	04	2	01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	n/a	-	-	34	81	34	81	34	81	34	81	34	81	34	81	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	04	2	01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	n/a	-	-	-	-	-	-	240	35	240	35	240	35	240	35	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	04	2	01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	n/a	320	75	320	10	320	10	320	10	320	10	320	10	320	10	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	04	2	01	06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	n/a	35	646	35	30	30	30	35	30	35	30	35	30	35	30	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	04	2	01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	n/a	1	59	1	65	1	65	1	65	1	65	1	65	1	65	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	04	2	01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	n/a	1	86	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	04	2	01	09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangsa (Indeks Pembangunan Keluarga)	n/a	-	-	2	50	2	50	3	50	3	50	3	50	3	50	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	04	2	01	10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangsa (Indeks Pembangunan Keluarga)	n/a	-	-	5	25	5	25	5	25	5	25	5	25	5	25	DPP & KB	Kab. Sijunjung

2	14	04	2	01	11	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	n/a	-	-	10	50	10	50	10	50	10	50	10	50	DPP & KB	Kab. Sijunjung		
2	14	04	2	01	12	Sosialisasi IPK	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPP & KB	Kab. Sijunjung		
2	14	04	2	01	13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	n/a	-	-	15	25	15	15	10	15	10	18	10	18	DPP & KB	Kab. Sijunjung		
2	14	04	2	01	14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	n/a	-	-	-	-	15	10	10	15	10	15	10	15	DPP & KB	Kab. Sijunjung		
2	14	04	2	02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Organisasi Masyarakat yang berperan serta dalam Kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	n/a	30,00	55	32,00	120	34,00	140	36,00	175	38,00	180	40,00	187	40,00	187	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	04	2	02	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPP & KB	Kab. Sijunjung		
2	14	04	2	02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	n/a	-	-	-	-	10	10	10	25	10	30	10	30	10	30	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	04	2	02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	n/a	-	-	-	-	10	10	10	30	10	30	10	30	10	30	DPP & KB	Kab. Sijunjung
2	14	04	2	02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	n/a	1	55	1	120	1	120	1	120	1	120	1	127	1	127	DPP & KB	Kab. Sijunjung

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam perumusan Indikator Kinerja dari OPD harus mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung tahap I (2021-2026) yang sejalan dengan visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sekaligus menjadi visi misi Kabupaten Sijunjung periode 2021 – 2026.

Adapun Indikator Kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut :

TABEL 7.1
INDIKATOR PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD TAHUN 2021-2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	55,73	55,75	55,80	55,85	55,90	60,00	60,00
2	Total Fertility Rate (TFR)	2,95	2,22	2,22	2,22	2,22	2,15	2,15
3	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)	73,85	75,24	76,63	78,02	79,41	80,80	80,80
4	Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	12,00	11,76	11,52	11,28	11,00	10,08	10,08

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2021-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2021–2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sijunjung dan disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung. Rencana strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2021–2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan tugas–tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai penjabaran visi dan misi, maka partisipasi dan komitmen seluruh aparat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung sangatlah diperlukan karena akan menentukan keberhasilan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah disusun sehingga diharapkan seluruh aparatur dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan perencanaan pembangunan di Kabupaten Sijunjung, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana Strategis

membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi.

Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta sesuai dengan tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung. Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2021–2026 ini menjadi acuan kerja bagi sekretariat dan bidang–bidang di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung. Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.

Muaro Sijunjung, Maret 2023
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA



RONI SATRIA, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19771024 199703 1 002